

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A Fickar Hadjar et.al., Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003).
- Agus Djojosoekarto dan Rudi Hauter, Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal, (Jakarta: Kerjasama ADEKSI dan Konrad-Adenauer-Stiftung, 2006).
- Aminah, S., Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Aristotle, Politics, (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1998).
- Assdiddiqie, J., Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 (Jakarta: FHUI Pers, 2012).
- Asshiddiqie, J., Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Asshiddiqie, J., Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Asshidique, J., Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2002).
- Asshidique, J., Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Azhari, A.F., Menemukan Demokrasi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005).
- Azis, M.N., Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah, (Jakarta: Badan Hukum Pembangunan Nasional, 2011).
- Azis, M.N., Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).
- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Budiyanto, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sma Kelas XI, (Jakarta:Erlangga, 2006).

- Handoyo, B.H.C., Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009).
- Handoyo, H.C., Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009).
- Hauter, H., Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal, (Jakarta: Kerjasama ADEKSI dan Konrad-Aenauer-Stiftung, 2006).
- Hermansyah, dkk, Putih Hitam Pengadilan Khusus: Bunga Rampai, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2013).
- Heywood, A., Political Theory, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004).
- Huda, N., UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Huda, N., Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, (Bandung: Nusamedia, 2014).
- Huda, N., Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia, (Bandung: Fokusmedia, 2008).
- Isra, S., Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Isrok dan Dhia Al Uyun, Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak), Cetakan kedua, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012).
- Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Cetakan pertama, Edisi Kedua, (Bandung: P.T Alumni, 2004).
- Kaloh, J., Kepemimpinan Kepala Daerah, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Kelsen, H., Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006).
- Latif, Y., Negara Paripurna, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- M. Mahrus Ali, dkk. Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi, 2011).
- M., Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan. (Jakarta: Yarsif Watampone, 2002).

- Mahdi, I., Hukum Tata Negara, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Marijan, K., Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Muhamimin, Metode Penelitian, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in transtition: Toward Responsive Law, cetakan kelima, (Bandung: Nusamedia, 2018).
- Rahmadi, T., Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari, PILKADA Penuh Euforia, Miskin Makna, (Jakarta: Bestari, 2015).
- Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari, PILKADA Penuh Euforia, Miskin Makna, (Jakarta: Bestari, 2015).
- Semiawan, C.R., Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya (Cikarang: Grasindo, 2010).
- Siahaan, M., Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: Setara Press, 2015).
- Sodikin. Hukum Pemilu; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. (Bekasi: Gramata Publishing, 2014).
- Soeprapto, M.F.I., Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya), (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Suharizal, Pemilukada: Regulasi Dinamika, dan Konsep Mendatang, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).
- Suharizal, Pilakda, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Sulardi, Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni, (Malang, Setara Press, 2012).
- Surbakti, R., Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Indonesia, 2007).
- Suteki dan Galang Taufani, Metode Penulisan Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

- Sutiyoso, B., Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009).
- Thaib, D., Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Thamrin, H., Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Tutik, T.T., Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Widodo, H., Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

B. JURNAL

- Affan, I., “Menanti Peradilan Khusus Pilkada”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.13, No.2, Juli-Desember 2018.
- Ayuni, Q., “Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, Jurnal Hukum & Pembangunan, No. 1, 2018.
- Fauzi, I.D., “Desain Badan peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024”, Jurnal Adhyasta Pemilu Vol.1, No.1, 2008.
- Hardjaloka, L., “Studi Dinamika Mekanisme Pilkada di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme Pilkada Negara Lainnya”, Jurnal RechtsVinding, Vol.4, No.1, April 2015.
- Hutapea, B., “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, Jurnal RechtsVinding, Vol.4, No.1, April 2015.
- Hutapea, B., Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol.4, No.1, April 2015.
- Ibrahim, Demokratisasi (Ikhtiar Budaya dan Nilai Menuju Demokrasi), Jurnal Progresif Vol.III, No.1, Juni 2010.

- Likadja, J.A.C., Memaknai Hukum Negara (Law Trough State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat), Hasanuddin Law Review Vol. 1, No. 1, April, 2015.
- Putra, M.D., Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila, LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah, Vol 23, No. 2, September 2021.
- Putra, M.W.P., “Pengaruh Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi, dan Spiritual Keagamaan”. POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan, Vol.1, No.2, Desember 2020.
- Ramses, A., “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999”, Jurnal Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003.
- Reba, Y.E., “Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah”, Jurnal Konstitusi, PSK-FH, Uncen, Vol. 1 No. 1 Juni 2009.
- Samsul, I., “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?”, Info Singkat Hukum Vol.VI, No.10/II/P3DI/Mei 2014.
- Saraswati, R., Calon Perseorangan Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pemilukada, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.20, No.2, 2011.
- Simamora, J., Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, September, 2014.
- Suhartono, S., “Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung”, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.3, September 2015.
- Sukmana, O., Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), Jurnal Sospol, Vol. 2 No. 1, September, 2016.
- Ugang, Y., Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jurnal Morality, Vol.1, No.1, September 2014.
- Widuri, D.W., Hubungan Antara Demokrasi dan Kesejahteraan Warga di Eropa: Analisis European Social Survey 2002-2008, Jurnal Ilmu Administrasi Pemerintahan, Vol.7, No.2, 2021.
- Yonata Harefa, dkk. Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, Jurnal Magister Hukum

C. PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

D. BAHAN DARI INTERNET

HukumOnline, Posisi Dilematis MA dalam Sengketa Pilkada Depok, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/posisi-dilematis-ma-dalam-sengketa-pilkada-depok-hol13610>, 2023.

Kompas.com, Ini Kronologi Penangkapan Akil Mochtar, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/03/1837456/Ini.Kronologi.Penangkapan.Akil.Mochtar>, 2023.

Mahkamah Konstitusi, Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2>, diakses pada 2 Maret 2023.

Mahkamah Konstitusi, Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi, diakses melalui [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan-Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%20Undang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan-Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%20Undang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi.), diakses pada 5 Maret 2023.

E. Lain – Lain

Hamdan Zoelfa, “Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia”, dalam Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam; Menyambut 73 Tahun Prof. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H, ed Hamdan Zoelva (Jakarta: Kencana, 2012).

Lihat Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2011).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2008.